

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tiongkok merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Pertumbuhan perekonomian negara Tiongkok tertinggi dengan rata-rata pertumbuhan 10 persen pertahun dalam kurun 30 tahun terakhir. Tiongkok juga merupakan negara pengekspor terbesar di dunia. Peningkatan jumlah utang tak terlepas dari keputusan pemerintah untuk membangun Infrastruktur.

Seperti yang telah di ketahui bahwa Tiongkok merupakan negara yang memiliki paham sosialis/komunis. Dimana masalah perekonomiannya diatur oleh negara dan warga negara yang akan menentang hukum. Namun di era sekarang, Tiongkok perlahan merubah sistem perekonomiannya ke arah yang lebih bebas. Sudah tidak ada lagi pengekangan terhadap pers dan negara memberi kebebasan kepada warga negara untuk bersaing dari segi ekonomi. Ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Tiongkok mulai mengarah dari Sosialis menuju Kapitalis. Namun sepertinya lebih kepada sistem ekonomi campuran yang isinya adalah sistem ekonomi sosialis dengan Kapitalis.

Seiring berjalannya waktu perekonomian di Tiongkok berjalan dengan begitu pesatnya, dikarenakan perekonomian Tiongkok yang lebih terbuka kepada

Dunia. Dengan adanya percampuran pemahaman sistem ekonomi Sosialis dan sistem ekonomi Kapitalis membuat negara Tiongkok menjadi lebih pesat dalam bidang perekonomiannya. Pada intinya sistem ekonomi yang dianut oleh negara Tiongkok telah berevolusi dari sistem sosialis menjadi sistem ekonomi campuran.<sup>1</sup>

Oleh sebab itu akan sulit bagi suatu negara dalam mengatur perekonomiannya jika hanya mengandalkan perekonomian dari dalam negeri saja, terlebih lagi bagi negara berkembang. Negara berkembang yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *Developing Country* (negara yang sedang membangun) tentunya banyak sekali membutuhkan modal dalam membangun perekonomiannya. Pembangunan ini sangat identik dengan adanya modal tau pendanaan. Pendanaan yang berasal dari dalam negeri ini terkadang tidak mencukupi untuk mendanai proyek yang disusun sehingga membutuhkan dana dari luar negeri yang harus dikembalikan pada saat atau waktu yang telah ditentukan.<sup>2</sup>

Tidak dipungkiri bahwa kondisi pembangunan ekonomi Indonesia selama ini karena adanya utang luar negeri yang jumlahnya meningkat setiap tahunnya. Berbagai macam cara yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia juga dengan menggunakan pinjaman dari luar negeri.

---

<sup>1</sup> <http://www.onlenpedia.com/2016/12/semua-tentang-sistem-ekonomi-negara.html> diakses jam 11:15 tanggal 24/11/2017.

<sup>2</sup> Syafiq Mahmadah Hanafi, "Hutang Luar Negeri antara Kebutuhan Rasional, Kebutuhan Etis", dalam *Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syariah No. 7 tahun 2000, Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2000*, hlm 28.

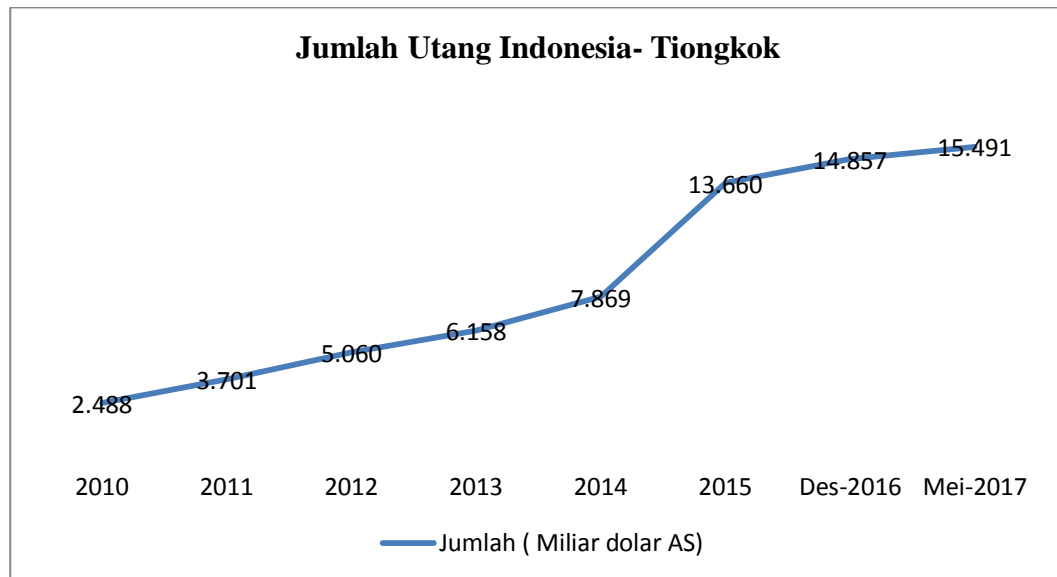
Indonesia memiliki banyak Sumber Daya Alam (SDA) akan tetapi lemah dalam Sumber Daya Manusia (SDM), maka dari itu Indonesia membutuhkan modal untuk mengembangkan potensi yang ada. Modal ini bisa di dapat dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dll yang tergabung dalam CGI (*Consultative Group on Indonesia*), IMF (*International Monetary Fund*), ADB (*Asian Development Bank*), World Bank, dll.

Akan tetapi pinjaman dari luar negeri tersebut memiliki konsekuensi-konsekuensi tertentu, karena negara maju termasuk negara Tiongkok pada umumnya memiliki sistem ekonomi kapitalis yang membolehkan penimbunan kekayaan. Sehingga dalam pemberian hutang kepada negara Indonesia juga mereka akan memperhatikan serta memperhitungkan seberapa banyak keuntungan yang akan di peroleh.

Grafik 1.1 Jumlah Utang Indonesia-Tiongkok 2010 - Mei 2017<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> [http://www.republika.co.id/berita/diakses\\_pada\\_tanggal\\_19/10/2017](http://www.republika.co.id/berita/diakses_pada_tanggal_19/10/2017) jam 09:55



Menurut Revrisond Baswir tentang peningkatan utang negara Indonesia yang meningkat setiap tahun, hal ini disebabkan karena perilaku boros yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menggunakan anggarannya. Sedangkan salah satu faktor pemborosan ini adalah adanya faktor korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara. Jadi mau atau tidak mau negara lah yang harus menanggung dan menutupi utang negara yang dikorupsi. Revrisond Baswir juga menilai bahwa hutang luar negeri yang diajukan oleh pemerintah Indonesia tidak ada kejelasan dalam penggunaannya, sehingga tidak dapat dilihat manfaat dari utang tersebut.

Bahkan ada salah satu kebijakan yang dimana mengambil utang luar negeri untuk menutupi utang luar negeri yang jatuh tempo. Dengan utang luar

negeri yang surplus dibandingkan dengan pemasukan yang di dapat oleh negara, maka dengan keadaan demikian negara mengambil kebijakan untuk menaikkan tarif pajak dan memberlakukan pajak pada setiap lini transaksi yang ada, mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji, serta menaikkan beban biaya rumah sakit. Kebijakan yang diambil tersebut dapat membebani masyarakat Indonesia.

Bagaimanapun juga utang luar negeri harus diakui banyak memberikan hasil bagi pembangunan negara. Pembangunan berbagai proyek prasarana seperti bendungan, irigasi, listrik, telepon, jembatan, jalan, sarana transportasi laut, darat, udara dll, yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga Indonesia pada akhirnya mencapai tingkat penghasilan perkapita yang meningkat. Indonesia bahkan sempat menjadi salah satu contoh keajaiban ekonomi dunia.<sup>4</sup>

Tidak hanya itu saja, Tiongkok masih berminat untuk mendanai sejumlah waduk di Indonesia, seperti jalan tol Cileunyi-Dawuan bagian I, pembangunan terowongan Balinka-Matur-Ngarai Sianok, pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan serta perbaikan jembatan, pembangunan bendungan serbaguna pelosika, pembangunan bendungan Jenelata, pembangunan bendungan Rokan Hilir/ Lomapatan Harimau, pembangunan bendungan serbaguna Jambo Aye,

---

<sup>4</sup> Cyrillus Harinowo, *Utang Pemerintah( perkembangan, prospek dan pengelolaannya)*, Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm5.

pembangunan bendungan Bonehulu, dan pengadaan material kereta api fase III dan IV.<sup>5</sup>

Dalam hal ini maka perlu disebutkan pendapat Sayyid Qutb, bahwa dalam bidang ekonomi seseorang tidak boleh memaksakan dirinya berhutang sebelum ia meninjau seberapa banyak kekayaan yang dimilikinya, masih cukupkah atau memang tidak mencukupi. Begitupula dengan suatu negara, menurut Sayyid Qutb tidak boleh mengimpor barang dari negara lain sebelum ia meninjau kekayaan yang dimilikinya dan juga kemampuan yang ada padanya.<sup>6</sup>

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan penuh serta hak kepemilikan mutlak kepada individu dan menggalakkan usaha perseorangan. Karena didasarkan pada nilai-nilai *Ilahiah*, sistem ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Memang dalam beberapa hal sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut, namun dalam banyak hal sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan kedua sistem tersebut.<sup>7</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Winda Afriyenis tentang Perspektif Ekonomi Islam terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi

---

<sup>5</sup> <http://m.metrotvnews.com/ekonomi/mikro/yKX4wEaK-ini-proyek-tiongkok-untuk-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia> diakses tanggal 19/10/2017 jam 11:10

<sup>6</sup> Sayyid Qutb, *keadilan sosial dalam islam*, terj. Afif Muhammad, cet.2. Bandung: Penerbit Pusaka, 1994), hlm. 1

<sup>7</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet.3, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.11

Indonesia, di jelaskan bahwasanya pemberian utang oleh negara maju kepada negara berkembang masih belum sesuai dengan sistem ekonomi Islam yang semestinya. Utang luar negeri pemerintah Indonesia selama ini masih menganut sistem bunga (riba) yang dikenal dengan riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan tambahan dari pengembalian utang yang disyaratkan oleh negara kreditur. Sehingga menurut pandangan Islam hutang luar negeri saat ini masih belum sesuai dengan utang piutang yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.<sup>8</sup>

Memang dalam pemberian hutang dari negara maju terhadap negara berkembang belum ada yang menggunakan sistem anti riba. Sebab sistem yang digunakan oleh negara maju ialah menggunakan sistem ekonomi Kapitalis, Sosialis, dan juga campuran yang dimana dalam pemberian hutangnya mereka akan melihat dan memperhitungkan seberapa banyak keuntungan yang akan di dapat dari negara berkembang khususnya Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya. Oleh sebab itu dalam pembahasan nanti akan dijelaskan macam macam akad kerjasama yang bisa digunakan oleh negara Indonesia untuk tidak melakukan hutang luar negeri.

Kohler menyatakan pendapatnya dalam bukunya Chairi dan Gozhali (2005: hal. 160), menyatakan bahwa utang adalah suatu jumlah yang harus dibayar dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Ahmad Azhar Basyir dalam

---

<sup>8</sup> Jurnal Kajian Ekonomi Islam Volume 1 No 1 Januari-Juni 2016, Winda Afriyenis, "*Perspektif Ekonomi Islam terhadap utang luar negeri pemerintah dalam pembangunan ekonomii Indonesia*".

bukunya yang berjudul *Hukum Islam tentang riba, Hutang piutang dan Gadai*, menyatakan bahwa pengertian hutang adalah pemberian milik dari pihak berpiutang kepada pemberi hutang dengan ketentuan akan dibayar kembali pada waktu yang telah ditentukan.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini hendak melihat praktek utang-piutang dalam dunia internasional (antara negara Tiongkok sebagai kreditur dan negara Indonesia sebagai debitur) dari perspektif sistem ekonomi Islam. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini hendak melihat apakah antara teori, praktek, serta implikasinya dari pinjaman luar negeri itu sesuai atau tidaknya dengan kaidah-kaidah sistem perekonomian Islam yang ada, yang pada dasarnya lebih mengutamakan moral dan kemaslahatan manusia.

## B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan dalam pembahasan, secara rinci permasalahan yang dikaji dalam studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana pemberian hutang oleh negara Tiongkok kepada negara Indonesia dalam perspektif sistem ekonomi Islam?

## C. Tujuan

Untuk mengkaji bagaimana praktek hutang piutang yang diberikan negara Tiongkok kepada negara Indonesia.

---

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir "*Hukum Islam tentang riba, hutang piutang dan Gadai*" Cet.2 (Bandung:PT. Al-Ma'arif,1983),hlm 41.



Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Memberikan wacana yang lebih komprehensif tentang praktek-praktek ekonomi terutama berkaitan dengan transaksi utang piutang dalam dunia Internasional
2. Menambah pemahaman tentang prinsip dasar ekonomi Islam dan aplikasinya terhadap praktek utang piutang dalam skala dunia Internasional.

#### D. Sistematika Pembahasan

Untuk mensistematisasi pembahasan ini, penyusun membagi pembahasan ini kedalam lima bab.

Bab pertama berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika pembahasan.

Bab kedua yang berupa pembahasan yang memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan hutang luar negeri dan ekonomi Islam.

Bab ketiga yang berupa metode penelitian yang memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini beserta alasannya, jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat yang berupa hasil dan pembahasan yang berisi tentang latar utang luar negeri, beban utang luar negeri, kerjasama utang luar negeri,

ketergantungan hutang luar negeri, eksploitasi Sumber daya alam maupun sumber daya manusia, etika utang luar negeri, dan hutang luar negeri menurut hukum Islam.

Bab kelima yang berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran.